



DPRD Minta Gubernur Serius

■ Dua Kali Tunda Penyampaian KUA PPAS

PONTIANAK, TRIBUN - Pembahasan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Kalbar dua kali dibatalkan, padahal telah diagendakan pihak Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Kalbar. Pihak DPRD pun meminta Gubernur Kalbar lebih serius menyikapi hal ini, lantaran KUA PAS merupakan pedoman dalam penyusunan APBD 2020 berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

"Ini persoalan serius, sudah dua kali ditunda. Padahal kita sudah masukan ke Badan Musyawarah (Banmus), tolong kita juga dihargai dalam arti



Kami mintalah, artinya dalam aspek aspek ini gubernur jangan mau dia sendiri saja.

Sudah banyak hal yang bukan prestasi, kita malu sebagai partai pengusung.

Subhan Nur
Anggota DPRD Kalbar

kata untuk membuat suatu hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif."



Terlambatnya penyusunan KUA PPAS kemarin karena sekitar satu minggu kita melaksana STQ Nasional di Pontianak, semua personel konsentrasi ke acara itu.



Ria Norsan
Wakil Gubernur Kalbar

Rabu (10/7).

Menurutnya dua kali pembatalan penyampaian KUA PPAS oleh gubernur ke DPRD sangat disayangkan. Bahkan Subhan menegaskan peristiwa ini adalah

■ Bersambung ke hal. 11



DPRD Minta Gubernur Serious

Sambungan Hal.9

'preseden' buruk bagi daerah, padahal Permendagri jelas telah mengatur hal tersebut.

"Kita minta gubernur dan jajarannya seriuslah terhadap hal ini. Alasan penundaan tidak masuk akal, masa karena kegiatan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) kemarin. Kalau hanya alasannya itu jadi lucu, inikan sistem," tegasnya.

Subhan menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang ada, minggu pertama Juli ini KUA PPAS harus disampaikan pada DPRD.

"Banmus akan dijadwalkan kembali, kita sudah menjadwalkan dua kali. Nah ini kan sudah dijadwalkan Banmus lewat Paripurna. Itukan gubernur meminta penundaan dua kali sudah," tambahnya.

Sesuai Permendagri ditegaskan Subhan, KUA PPAS harus pekan pertama disampaikan pada kepala daerah dari Ketua Tim Anggaran Daerah.

Pada penjadwalan ketiga ini, Subhan minta agar pemba-

hasan dan penyusunan KUA PPAS sudah rampung dan siap dilanjutkan di DPRD sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Kami sudah sampaikan agar Wakil Gubernur menyampaikannya kepada gubernur. Ini memengaruhi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada OPD nantinya kalau terus terlambat," ujarnya.

Sebab KUA PPAS, tandasnya adalah acuan dalam menyusun APBD, sehingga harus cepat dirampungkan. Akibat persoalan ini, disebut Subhan, menunjukkan aspek hubungan dengan gubernur kurang baik.

"Kami mintalah, artinya dalam aspek aspek ini gubernur jangan mau dia sendiri saja. Sudah banyak hal yang bukan prestasi, kita malu sebagai partai pengusung. Kita minta harus ada hubungan yang harmonis yang harus dijalin antara eksekutif dan legislatif. Kami dari partai pengusung tetap menjalankan sebagai fungsi

kontrol," tukas politisi asal Sambas ini.

Selain itu, Subhan juga menyinggung masalah Kalbar yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Menurutnya Kalbar sudah enam tahun WTP, namun dibawah kepemimpinan Midji-Norsan malah mendapat WDP.

"Tahun ini kita dapat WDP, artinya ada penurunan prestasi. Apapun alasan atau komitmen yang dibuat gubernur tentang BPK, yang jelas bahwa WDP itukan satu keputusan institusi pengawas dan audit yang ditunjuk oleh negara. Oleh sebab itu kita minta, dari aspek aspek ini, gubernur pun harus hadir dalam pembahasan KUA PPAS," tandas Subhan.

Menanggapi kekecewaan pihak DPRD, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengakui bahwa agenda yang buat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD sebanyak

dua kali memang ditunda.

"Memang kita sudah dua kali dijadwalkan oleh Bamus untuk penyampaian KUA PPAS, namun dibatalkan," ucap Norsan usai Paripurna terkait tanggapan akhir kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi tentang Raperda Ketenagakerjaan dan Pelestarian, Pengelolaan Cagar Budaya, Rabu (10/7).

Norsan menyampaikan alasan bahwa keterlambatan penyusunan KUA PPAS oleh pihak eksekutif karena benar-benar sibuk dengan agenda nasional, yaitu STQ. "Terlambatnya penyusunan KUA PPAS kemarin karena sekitar satu minggu kita melaksana STQ Nasional di Pontianak, sehingga semua personel berkonsentrasi pada acara tersebut," ucapnya.

Ia memastikan bahwa, Selasa (10/7), penyusunan KUA PPAS sudah tuntas, dan akan dijadwalkan paling lama 15 Juli bisa disampaikan pada DPRD. **(oni)**